

LEMBAR INFORMASI NOMOR 3

Masyarakat Adat dan Badan-badan PBB Berdasarkan Sistem Piagam

Sistem Piagam PBB : Bagaimana Menggunakannya

Kata-kata Kunci dan Gagasan

Piagam PBB

Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat

Sub-Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia

Komisi Hak Asasi Manusia

Sidang Umum

Kelompok Kerja untuk Penyusunan Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat

Forum Tetap untuk Masalah-Masalah Adat

Ringkasan: *Badan PBB yang paling penting bagi masyarakat adat adalah Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat (Working Group on Indigenous Population atau biasa disingkat WGIP), Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (KOMISI HAK ASASI MANUSIA) dan Kelompok Kerja untuk Penyusunan Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat. Mengikuti keputusan dari Komisi Hak-Hak Asasi Manusia dan ECOSOC diterima oleh Sidang Umum pada tahun 2000, maka dibentuklah Forum Tetap untuk Masalah-Masalah Adat.*

Pada Lembaran Nomor 2 (Masyarakat Adat, PBB dan Hak-Hak Asasi Manusia) telah dijelaskan perbedaan antara badan-badan PBB untuk Hak-Hak Asasi Manusia dan mekanisme yang ditetapkan sebagai hasil resolusi dan keputusan dalam Sistem PBB (badan-badan yang berdasarkan sistem piagam) dan yang ditetapkan melalui kesepakatan-kesepakatan hak-hak asasi manusia yang mengikat secara hukum (badan-badan yang berdasarkan sistem kesepakatan). Lembaran ini akan memusatkan perhatian pada pembicaraan tentang badan-badan yang berdasarkan sistem piagam.

Jika badan-badan yang berdasarkan sistem kesepakatan bersifat tidak tergantung pada pemerintah Negara maka berbagai badan yang berdasarkan sistem piagam secara sangat kuat dipengaruhi oleh pemerintahan; petinggi-petinggi badan-badan tersebut terdiri dari jajaran para pemerintah. Badan-badan tersebut sangat dipolitisir. Jika badan-badan yang berdasarkan sistem kesepakatan terdiri dari para ahli yang independen, maka badan-badan yang berdasarkan sistem piagam bekerja sebagian besar melalui konferensi-konferensi dan pertemuan dimana wakil-wakil dari pemerintah dan LSM mengadvokasikan posisinya.

Lembaran ini hanya memberikan perhatian utama pada unsur-unsur terpenting dalam sistem piagam. Badan hak-hak asasi manusia PBB yang paling penting adalah

Komisi Hak-Hak Asasi Manusia yang bertemu setiap tahun selama 6 minggu rangkaian acara dan terdiri dari 53 pemerintah anggota PBB yang dipilih untuk masa waktu 3 tahun. Komisi ini bertanggungjawab kepada Dewan Ekonomi Sosial dan Budaya. Badan tertinggi PBB adalah Sidang Umum PBB yang bertemu setiap tahun dari bulan September hingga bulan Desember dan memberikan pengesahan final atas setiap usulan dari berbagai badan dalam sistem hak-hak asasi manusia PBB (Bagan yang menjelaskan hubungan antara berbagai badan tersebut terdapat di Lembaran nomor 1: Masyarakat Adat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa: Sebuah Tinjauan).

Di bawah Komisi Hak-Hak Asasi Manusia terdapat berbagai badan dan mekanisme lainnya. Dari sejumlah badan dan mekanisme tersebut yang paling penting adalah Sub-Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia. Sub-Komisi ini juga disebut badan para ahli yang terdiri dari individu-individu – bukan pemerintah - dan diharapkan berfungsi sebagai “think tank” atau kelompok pemikir yang memberi masukan untuk Komisi Hak-Hak Asasi Manusia. Sub-Komisi ini biasanya bertemu setiap tahun selama tiga minggu pada bulan Agustus. Sub-Komisi memiliki badan-badan di bawahnya lagi termasuk di antaranya Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat. Kelompok Kerja ini bertemu satu minggu sebelum rangkaian acara pertemuan Sub-Komisi dimulai. Badan lainnya yang semakin memiliki penting perannya adalah Kelompok Kerja tentang Draft Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat (lihat Lembaran Nomor 5 “ Draft Deklarasi”).

Sidang Umum PBB biasanya bertemu di New York, Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya bertemu selang-seling antara New York dan Jenewa, badan-badan lainnya bertemu di Jenewa.

Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat

Kata-kata Kunci dan Topik

Status Dewan Ekonomi Sosial dan Budaya atau Status Ekosob (Ecosoc Status)

Dana Sukarela untuk Masyarakat Adat PBB

Pengamat

***Ringkasan:** Badan berdasarkan sistem Piagam PBB yang paling dapat diakses oleh masyarakat adat adalah Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat. Kelompok Kerja ini memungkinkan masyarakat adat untuk menyampaikan permasalahan mereka di PBB. Masyarakat adat dapat melakukan ini melalui upaya berjejaring, menyampaikan pidato dan menyediakan informasi.*

Kelompok kerja yang dibentuk di bawah Sub-Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia ini mengadakan pertemuan pertama kalinya pada tahun 1982. Kelompok Kerja ini terdiri dari 5 anggota Sub-Komisi di mana tiap anggota mewakili tiap wilayah geografis PBB yang dibuat berdasarkan kepentingan untuk pemungutan suara. Pada tahun 2000, pemimpin Kelompok Kerja adalah Mr. Alfonso Martinez dari Cuba. Anggota ahli lainnya berasal dari Yunani, Jepang, Senegal dan Romania.

Pertemuan Kelompok Kerja merupakan salah satu pertemuan hak-hak asasi manusia terbesar di PBB. Kurang lebih 1000 peserta datang setiap tahun untuk menyampaikan pendapatnya dan mendengarkan pendapat yang lainnya. Wakil-wakil masyarakat adat

datang dari berbagai wilayah di dunia dan telah memperoleh ketrampilan tambahan yang dimiliki dalam memanfaatkan forum-forum PBB secara efektif. Namun demikian, penting sekali disadari bahwa para pemerintah dan LSM yang terlibat dalam kelompok kerja ini hanya memiliki status sebagai **pengamat** dimana mereka tidak mengontrol proses atau hasil-hasil pertemuan karena itu semua dilakukan oleh 5 ahli anggota Kelompok Kerja.

Partisipasi Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat

Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat sangat terbuka untuk keterlibatan lembaga swadaya masyarakat. Umumnya, PBB mengizinkan partisipasi para LSM dengan dasar telah mendapat status resmi dari Dewan Ekonomi Sosial dan Budaya (Dewan Ekosob) dan melalui proses aplikasi yang rumit dan panjang. Telah disadari sejak awal bahwa upaya untuk mendapatkan status formal dari dewan supaya dapat berpartisipasi dalam kelompok kerja tidak saja memberikan posisi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat adat, namun juga dapat menyebabkan proses pertemuan Kelompok Kerja menjadi tidak efektif. Karena itu, Kelompok Kerja terbuka bagi siapa pun individu masyarakat adat dan individu lainnya seperti akademik yang memiliki keahlian khusus dibidangnya.

Agenda Kelompok Kerja

Pada waktu lampau, ada dua topik besar dalam agenda Kelompok Kerja. Yang pertama adalah Tinjauan tentang Pembangunan atau "*Review of Developments*" yang memberikan kesempatan kepada para masyarakat adat dan wakil-wakilnya untuk mengangkat isu tertentu dan kesempatan kepada para pemerintah untuk menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai pembangunan. Topik ini biasanya menimbulkan diskusi paling panas dan memakan waktu paling banyak dari waktu yang tersedia. Topik yang kedua adalah "Penyusunan Standar atau Tolok Ukur" yang memfokuskan pada penyusunan atau draft Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat (lihat Lembaran Nomor 5 "Draft Deklarasi").

Sejak tahun 1996, Kelompok Kerja telah berusaha untuk memfokuskan sesi diskusi "Review of Developments" untuk membahas tema khusus setiap tahun. Pada tahun 2000, tema khusus tersebut adalah "Pemuda dan Anak-Anak Masyarakat Adat"; pada tahun 2001, tema khususnya adalah "Masyarakat Adat dan Haknya untuk Membangun". Dengan memfokuskan pada satu tema, para organisasi khusus masyarakat adat dapat memberikan kontribusi yang lebih substantif kepada Kelompok Kerja dan memiliki kesempatan lebih baik untuk berbagi informasi dengan organisasi lainnya yang bergerak dibidang yang sama. Meskipun masih memungkinkan untuk mengangkat isu-isu lainnya disarankan lebih baik untuk mencari tahu lebih dulu tema khusus yang akan dibahas. Sehingga wakil-wakil masyarakat adat yang memiliki minat tertentu dapat berpartisipasi lebih produktif.

Isu-isu lainnya yang menjadi kepentingan Kelompok Kerja dan para pesertanya adalah:

- Studi mengenai berbagai kesepakatan dengan memfokuskan pada kesepakatan yang dibuat oleh para pemerintahan kolonial dan masyarakat adat di Amerika Utara dan Amerika Selatan.

- Susunan dan isi dari Dekade Internasional Masyarakat Adat Sedunia (1995-2004). (Untuk informasi lebih lanjut mengenai dekade tersebut lihat Lembaran Nomor 7 mengenai “Dekade Internasional Masyarakat Adat Sedunia”.)
- Warisan kebudayaan dan kepemilikan intelektual masyarakat adat
- Kertas kerja tentang hak atas tanah, yang disetujui pada tahun 1997
- Forum Permanen untuk Masyarakat Adat dalam sistem PBB (Untuk informasi lebih lanjut lihat Lembaran Nomor 6 mengenai “Forum Tetap”).

BERPARTISIPASI DALAM KELOMPOK KERJA UNTUK MASYARAKAT ADAT

Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat adalah badan PBB yang paling penting bagi masyarakat adat. Kelompok Kerja ini memberikan kesempatan bagi masyarakat adat dari berbagai belahan dunia untuk berkumpul dan berbagi pengalaman mereka, bergabung dalam solidaritas menghadapi tantangan bersama, dan untuk menyampaikan permasalahan mereka ke PBB. Penting sekali bagi masyarakat adat untuk memanfaatkan kesempatan yang disediakan oleh Kelompok Kerja ini. Namun perlu juga disadari keterbatasan-keterbatasan Kelompok Kerja sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah-masalah spesifik dari pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Ada tiga cara berpartisipasi dalam Kelompok Kerja: membuat kontak dengan peserta lainnya, menyampaikan pidato dan menyediakan informasi.

Membuat Kontak dengan peserta lainnya dan berjejaringan

Pertemuan Kelompok Kerja menyediakan suatu kesempatan untuk bertemu dengan peserta dengan minat-minat khusus pada situasi masyarakat adat; masyarakat adat dari berbagai belahan dunia; para ahli dari Sub-Komisi yang juga merupakan anggota resmi Kelompok Kerja; para akademik yang memiliki keahlian di bidang masalah-masalah adat; para staff PBB yang memperhatikan masalah-masalah masyarakat adat dalam Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak-Hak Asasi Manusia di Jenewa atau dalam agen-agen khusus PBB seperti WHO, atau ILO; dan wakil-wakil pemerintah. Mengingat sejumlah besar agen-agen khusus tersebut memiliki lokasi kantor yang tidak jauh, maka akan mudah untuk mengatur pertemuan (daftar untuk alamat website organisasi-organisasi internasional yang dapat berguna untuk masyarakat adat, terlampir dalam Lembaran informasi ini).

Terdapat sejumlah LSM di Jenewa yang bertujuan untuk membantu para peserta adat dalam Kelompok Kerja untuk bekerja lebih efektif. Anda dapat menghubungi LSM-LSM ini segera setelah anda tiba di Jenewa atau bahkan sebelum tiba, jika memungkinkan. LSM tersebut antara lain adalah Pusat Dokumentasi Masyarakat Adat (The Indigenous Peoples’ Documentation Centre, doCip) (website: www.docip.org; FAX 41-22-740-3454; TEL 41-22-740-3433) dan Pelayanan Internasional untuk Hak-Hak Asasi Manusia (The International Service for Human Rights, ISHR) (website: www.ishr.ch; FAX 41-22-733-0826; TEL 41-22-733-5123). Pusat Dokumentasi memiliki peralatan pengolah kata, mesin fotokopi, pengiriman faks, koneksi e-mail, pelayanan dokumentasi dan informasi, akomodasi di Jenewa dan

dapat menyediakan informasi mengenai liputan masalah-masalah masyarakat adat pada semua pertemuan PBB).

Ada banyak kesempatan untuk berbicara dengan peserta secara informal pada saat sesi Kelompok Kerja berlangsung. Anda sepanjang waktu akan terus berhubungan dengan masyarakat adat lainnya. Anda jangan ragu-ragu untuk mencari peserta lainnya dan menyampaikan pesan-pesan anda. Itu yang diharapkan dilakukan oleh para peserta di PBB; begitulah cara kerjanya. Anda dapat berbincang dengan lainnya di kedai kopi yang berada disamping ruangan konferensi, anda dapat makan bersama dengan mereka secara informal, anda dapat berdiskusi di pada acara-acara resepsi yang biasanya diselenggarakan dalam sesi Kelompok Kerja berlangsung. Anda juga dapat menghampiri para peserta di ruangan dimana pertemuan sedang berlangsung dan bertanya jika anda dapat berdiskusi dengan mereka. Jika mereka tidak terlalu sibuk, biasanya mereka akan bersedia keluar dan berdiskusi dengan anda. Jika apa yang dibicarakan dapat diselesaikan segera maka mereka akan langsung membicarakannya. Jika anda ingin berbicara dengan para ahli di Sub-Komisi atau orang-orang tertentu dari PBB, akan membantu jika anda sudah memiliki gagasan yang jelas akan apa yang hendak disampaikan sebelumnya. Pertimbangkanlah apa yang anda ingin sampaikan kepada mereka, buatlah pesan anda secara jelas dan sampaikan secara tidak berbelit-belit.

Menyampaikan Pidato

Pertemuan utama Kelompok Kerja adalah serangkaian panjang pidato-pidato resmi yang disampaikan oleh perorangan yang sebagian besar merupakan wakil-wakil masyarakat adat, para ahli Sub-Komisi dan wakil-wakil pemerintah. Jika anda terlibat di dalam Kelompok Kerja maka sangatlah penting untuk menyampaikan pesan anda dalam pertemuan seperti itu melalui pidato.

Mungkin anda pada awalnya merasa bahwa metode Kelompok Kerja membingungkan. Pidato-pidato tersebut dibuat dalam suatu tata urutan menurut para peserta yang meminta untuk diberi kesempatan berbicara. Ini berarti tidak ada kesempatan untuk melanjutkan sebuah pidato dengan perdebatan. Pada satu saat anda dapat mendengarkan individu masyarakat adat berbicara mengenai kesulitan-kesulitannya, berikutnya mendengarkan wakil pemerintah menyampaikan dalam forum tersebut program-program pemerintahnya, kemudian anggota Kelompok Kerja memberikan pendapatnya. Selain itu, kesan pada umumnya, sebagian besar peserta biasanya tidak memberi perhatian pidato-pidato tersebut.

Untuk membuat pidato seefektif mungkin (terlepas apakah anda akan menyampaikannya atau tidak), anda dapat mempertimbangkan masukan-masukan sebagai berikut:

- Cari tahu bagaimana caranya agar dapat dimasukkan dalam daftar orang-orang yang akan berpidato. Lakukanlah ini pada awal pertemuan. Biasanya, kesempatan yang diberikan pada waktu tertentu, sore atau pagi hari tertentu. Jangan terlalu mempermasalahakan hal ini. Anda harus berjaga-jaga beberapa jam dari selang waktu yang diberikan kepada anda untuk memastikan agar anda ada disana ketika diminta untuk menyampaikan pesan anda. Jika anda tidak berada pada saat anda diminta berbicara anda dapat kehilangan

kesempatan menyampaikan pesan anda. Jika anda harus meninggalkan pertemuan sejenak, pastikan ada orang lain yang dapat membacakan pidato anda jika nama anda dipanggil sewaktu-waktu.

- Siapkan pidato anda dengan baik sebelumnya. Pastikan pidato anda jelas, memiliki argumen yang baik dan menyertakan fakta-fakta yang nyata untuk mendukung masalah anda. Siapkan salinan teks di hadapan anda sebelum mulai berbicara. Berikan 10 kopi teks anda kepada para penterjemah dan Sekertaris pertemuan. Ingatlah bahwa ada banyak peserta dalam pertemuan yang tidak mengerti bahasa anda dan harus mengandalkan penterjemah untuk mengetahui apa yang anda katakan. Jika para penterjemah sudah memiliki teks pidato, maka tugas mereka akan lebih mudah dan pesan anda akan dapat disampaikan secara lebih efektif.
- Ketahui waktu bicara yang diberikan; umumnya 5 atau 10 menit. Berlatihlah berpidato sebelumnya dan pastikan bahwa pidato tersebut sesuai dengan panjang waktu yang diberikan. Jika anda berbicara lebih dari waktu yang diberikan, pemimpin acara akan menginterupsi dan meminta anda untuk menyelesaikan. Jika anda menunda bagian terpenting dari pidato anda pada bagian akhir dari pidato maka anda dapat kehilangan kesempatan untuk menyampaikannya.
- Berbicaralah perlahan dan jelas. Beberapa orang umumnya menjadi sangat bersemangat dan cenderung berbicara lebih cepat dari biasanya. Seringkali ini berdampak tidak ada yang dapat memahami mereka dan apa yang mereka sampaikan menjadi sia-sia. Perhatikan bagaimana para pembicara terkenal menyampaikan pidato mereka. Jika anda mendengar seseorang yang berbicara secara efektif, cobalah tiru tehnik mereka.
- Buatlah 20 kopi teks pidato atau pernyataan anda untuk didistribusikan kepada orang-orang yang tertarik setelah mendengar penyampaian anda. Anda akan melihat bahwa mereka yang tertarik akan datang untuk meminta kopi teks sehingga anda dapat memberikannya langsung. Pengecualian diberikan kepada para pemerintah; pastikan bahwa wakil pemerintah dari negara anda menerima kopi teks anda. Dengan demikian, pesan-pesan yang anda ingin sampaikan akan diteruskan kepada pihak-pihak yang memegang posisi untuk mengambil tindakan.

Anda harus menyadari bahwa pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja umumnya memberikan dampak yang kecil saja ke negara anda sendiri, meskipun Kelompok Kerja merupakan forum dimana anda dapat mengangkat masalah-masalah anda agar pemerintah anda mencari resolusi dan mengambil tindakan. Mengingat kenyataan ini, menjadi sangat penting bagi anda untuk mendukung media massa di negara anda supaya dapat meliput aktivitas-aktivitas Kelompok Kerja.

Ruangan pers di gedung PBB di Jenewa menyediakan jasa untuk berbagai organisasi media massa internasional. Staff yang ada di ruang pers tersebut dapat membantu anda untuk menghubungi wakil dari organisasi media massa tersebut. Mungkin ada wakil media yang menetap di sana yang berasal dari negara anda sendiri. Anda dapat menyampaikan pers release anda ke dalam kotak pesan yang ada di ruangan pers,

tetapi lebih baik melakukan hubungan kontak dengan wartawan yang bersangkutan. Akan sangat berguna juga bila sebelum anda menyampaikan pesan anda dalam pertemuan bertemulah dulu dengan wakil media yang bersedia membantu anda dan pastikan anda memberikan kopi teks anda kepadanya.

Sangat penting bagi para pendukung di negara anda juga bekerja secara paralel dengan anda. Pada saat anda di Jenewa mereka dapat menghubungi media setempat dan memberitahukan sejak awal mengenai topik yang akan anda sampaikan dalam Kelompok Kerja dan mendorong media tersebut untuk meliput acara tersebut. Akan bermanfaat jika anda dapat memberikan informasi mengenai latar belakang Kelompok Kerja kepada media lokat tersebut untuk membantu mereka memahami konteks dari pidato yang anda akan sampaikan. Pastikan bahwa anda memiliki waktu bagi wartawan mana saja yang menghubungi anda dan cantumkan nomor telepon anda yang dapat dihubungi dalam pers release anda.

Menyediakan Informasi

Kelompok Kerja tidak hanya bekerja sebatas pada pertemuan tahunan saja. Kelompok Kerja juga mempersiapkan penelitian-penelitian, misalnya mengenai warisan budaya masyarakat adat, persoalan tentang susunan-susunan kesepakatan sebelumnya dengan masyarakat adat dan hak atas tanah. Penelitian-penelitian ini dilakukan oleh para ahli anggota Kelompok Kerja pada selang waktu antara pertemuan-pertemuan tahunan dan disebarakan sebagai dokumen dalam pertemuan tahunan. Laporan penelitian umumnya berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat adat. Mereka yang memiliki keahlian dan pemahaman mengenai masalah yang diteliti dan mereka yang merasa dapat memberikan kontribusi, dapat memberikan pengaruh positif untuk penelitian dengan memberikan informasi tersebut pada waktunya. Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak-Hak Asasi Manusia juga mungkin meminta informasi dari LSM-LSM yang bergerak dalam isu masyarakat adat mengenai berbagai masalah.

Namun demikian, kegiatan seperti di atas lebih berguna untuk proyek-proyek dan dukungan untuk jangka panjang. Kegiatan ini bukan cara yang produktif untuk mengangkat perhatian atas pelanggaran hak asasi manusia yang khusus, meskipun mungkin dapat mempengaruhi pendapat para staf pemerintah di berbagai negara mengenai bagaimana mengatasi secara efektif isu-isu jangka panjang.

Tabel berikut ini disusun oleh staf Dana Sukarela PBB untuk Masyarakat Adat memberikan ringkasan kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan saat berlangsungnya sesi Kelompok Kerja:

<p style="text-align: center;">Melobby</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para ahli anggota Kelompok Kerja - Pemerintah - Sistem PBB 	<p style="text-align: center;">Tukar-Menukar Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempelajari isu-isu penting yang dibawa oleh komunitas dan organisasi masyarakat adat lainnya - Menyuarakan masalah anda - Berbagi informasi mengenai kegiatan dari komunitas anda berasal 	<p style="text-align: center;">Membangun Kerjasama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antara komunitas dan organisasi masyarakat adat yang memiliki tujuan yang sama - Belajar dari pengalaman masing-masing dan praktek-praktek unggul lainnya
<p style="text-align: center;">Meningkatkan Kesadaran Atas Masalah-Masalah Adat di dalam Sistem PBB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berpartisipasi dalam diskusi-diskusi mengenai masalah masyarakat adat di dlm Sistem PBB - Memastikan masalah-masalah masyarakat adat dimasukkan dalam agenda PBB dan agen-agen khusus 	<p style="text-align: center;">Mempelajari hak-hak yang dimiliki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melalui pemahaman akan sistem PBB, hak-hak masyarakat adat dan hak-hak asasi manusia 	<p style="text-align: center;">Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan parallel seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaukus masyarakat adat - Sejumlah workshop dan presentasi dengan berbagai topik - Sesi-sesi pelatihan

Dana Sukarela PBB untuk Masyarakat Adat (UN Voluntary Fund)

Dana sukarela untuk Masyarakat Adat didirikan pada tahun 1985 untuk membantu wakil-wakil komunitas dan organisasi adat berpartisipasi dalam kegiatan Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat melalui penyediaan bantuan keuangan. Insititusi ini memperoleh dana dari kontribusi sukarela dari berbagai pemerintahan, LSM dan pihak swasta atau pihak publik lainnya. Bahan-bahan informasi mengenai institusi ini dapat ditemukan dalam Lembaran ini.

Jika anda menginginkan informasi mengenai institusi ini atau ingin memperoleh lembar aplikasi, hubungi Sekretariat Dana Sukarela untuk Masyarakat Adat pada alamat berikut ini:

Trust Fund Unit
 Kantor PBB Komisioner Tinggi untuk Hak-Hak Asasi Manusia
 CH-1211 Geneva 10 – Switzerland
 Tel (41 22) 917 – 9146/917-9145 Fax: (41 22) 917-90 17
 Email: eortado-rosich.hchr@unog.ch/emonsalve.hchr@unog.ch

Sub-Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia

Ringkasan: Sub-Komisi adalah badan di atas Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat. Tugas yang diemban oleh badan ini adalah membuat garis-garis besar masalah-masalah hak asasi manusia dan menyediakan kesempatan bagi individu-individu masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam sistem hak-hak asasi manusia PBB. Dalam menentukan apakah anda ingin terlibat dalam pertemuan-pertemuan Sub-Komisi, perlu mempertimbangkan antara biaya yang dikeluarkan dan efektifitas yang diperoleh sebab pertemuan Sub-Komisi tersebut diselenggarakan setelah sesi pertemuan Kelompok Kerja.

Sub-Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia (biasa disebut dengan “Sub-Komisi” saja) merupakan salah satu bentuk pertemuan besar PBB mengenai hak asasi manusia. Sub-Komisi tersebut merupakan badan yang di atas Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat yang terdiri dari 26 anggota yang berasal dari berbagai belahan dunia. Kedua puluh enam anggota Sub-Komisi tersebut merupakan kumpulan para ahli yang bekerja sesuai kapasitasnya masing-masing. Sub-Komisi bertemu setiap bulan Agustus di Jenewa selama 3 minggu setelah sesi pertemuan Kelompok Kerja berakhir.

Sub-Komisi dan Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat

Agenda Sub-Komisi meliputi sebagian besar isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian di tingkat internasional. Salah satu agenda tersebut adalah hak-hak asasi masyarakat adat dimana Sub-Komisi melakukan pertimbangan dan melakukan tindakan berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari Kelompok Kerja. Misalnya, Sub-Komisi akan merekomendasikan tema utama untuk sesi pertemuan Kelompok Kerja berikutnya atau Sub-Komisi dapat meminta salah satu anggota Kelompok Kerja yang sedang melakukan penelitian untuk memberikan laporan awal yang dipersiapkan bagi pertemuan Kelompok Kerja atau Sub-Komisi berikutnya. Sub-Komisi juga merekomendasikan penelitian-penelitian baru ke badan di atasnya lagi, yaitu Komisi Hak-Hak Asasi Manusia. Pada waktu lampau, Sub-Komisi memberikan rekomendasi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masyarakat adat dalam aspek hak atas tanah, budaya dan kekayaan intelektual serta kesepakatan-kesepakatan.

Sub Komisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat telah menganggap seolah-olah pertemuan Sub-Komisi adalah forum antar mereka. Kelompok pemerintah umumnya secara relatif mengambil posisi yang tidak terlalu menonjol dalam Sub-Komisi, sementara kelompok LSM sangat aktif melakukan pendekatan kepada para ahli dan menyampaikan pidatonya.

Berpartisipasi di dalam Sub-Komisi

LSM-LSM yang menghadiri pertemuan Kelompok Kerja sering ingin memperpanjang masa tinggalnya di Jenewa untuk menghadiri pertemuan Sub-Komisi. Namun demikian, anda harus mempertimbangkan apakah kesempatan untuk kegiatan tambahan tersebut seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk tinggal lebih lama di Jenewa selama tiga minggu. Selain itu, sistem akreditasi untuk mengikuti pertemuan Kelompok Kerja relatif lebih longgar dibandingkan untuk mengikuti pertemuan Sub-Komisi, karena itu hanya LSM-LSM yang memiliki status dari Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dapat berbicara dan menyerahkan dokumen-dokumen. (Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana memperoleh status dari Dewan Ekonomi Sosial dan Budaya, lihat Lembaran Nomor 1).

Untuk masyarakat adat, manfaat utama dari menghadiri pertemuan Sub-Komisi adalah kesempatan untuk menyampaikan persoalan mereka kepada berbagai pihak yang bekerja di bidang hak-hak asasi manusia dengan berbicara kepada mereka di luar pertemuan formal Sub-Komisi. Selain itu, keuntungan lainnya adalah masyarakat adat dapat membuat aliansi bersama dengan para pejuang hak asasi manusia lainnya. Termasuk ke-26 pakar anggota Sub-Komisi, banyak di antara mereka yang bersimpati kepada masalah-masalah masyarakat adat meskipun mereka bukan anggota Kelompok Kerja. Banyak LSM juga peduli terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan mungkin bersedia untuk memperjuangkannya.

Masyarakat adat juga bisa memperoleh kesempatan untuk berbicara di dalam pertemuan Sub-Komisi. Jika organisasi anda tidak memiliki status formal untuk dapat mengikuti pertemuan, anda bisa berbicara dalam pertemuan tersebut jika anda dapat berhubungan dengan LSM lain yang memiliki status PBB. Jika mereka bersedia, maka mereka dapat mendaftarkan anda sebagai wakil dan bersedia membagi jatah waktu bicaranya untuk agenda diskusi yang terkait yang akan anda sampaikan. Ini tidak sulit untuk dilakukan, tetapi tidak boleh dilakukan mendadak tanpa persiapan. Artinya anda harus menghubungi mereka jauh hari sebelumnya. LSM-LSM seperti Pusat Dokumentasi Masyarakat Adat, Penelitian dan Informasi (doCip) atau Pelayanan Internasional untuk Hak-Hak Asasi Manusia kemungkinan dapat membantu anda menemukan organisasi yang bersedia memberi anda akreditasi.

Komisi Hak Asasi Manusia

Kata-Kata Kunci dan Topik

PelaporKhusus

Prosedur 1503

Mekanisme Pengaduan

Tindakan Mendesak

***Ringkasan:** Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (The Commission on Human Rights atau biasa disingkat CHR) adalah badan hak asasi manusia PBB ter penting dan paling aktif. Masalah-masalah masyarakat adat menjadi topik yang lebih menonjol dalam tugas-tugasnya. CHR membuat mekanisme pengaduan yang dapat digunakan oleh*

masyarakat adat. Informasi mengenai pelanggaran hak-hak asasi manusia juga dapat dikirim ke badan-badan penyelidikan CHR.

Komisi Hak-Hak Asasi Manusia adalah forum hak asasi manusia PBB terbesar dan terpenting. Biasanya, lebih dari 3000 orang terlibat dalam pertemuan Komisi dalam tiap sesi pertemuan. Komisi tersebut melakukan pertemuan selama 6 minggu sesi setiap tahun, biasanya dalam bulan Maret dan April, dimana para anggota dan pengamat memberikan pidato-pidato resmi mengenai berbagai masalah hak asasi manusia. Komisi ini terdiri dari 53 negara anggota, dimana tiap anggota diwakili oleh satu delegasi pemerintah. Anggota PBB lainnya yang tidak menjadi anggota Komisi, menghadiri pertemuan Komisi dengan status sebagai pengamat. Sejumlah besar LSM juga terlibat dalam pertemuan tersebut mewakili hampir seluruh aspek perjuangan hak-hak asasi manusia di dunia. Banyak juga tamu-tamu penting yang menghadiri pertemuan Komisi, seperti presiden, perdana menteri, menteri luar negeri dan menteri kehakiman, menyampaikan pidato masing-masing selama pertemuan berlangsung.

Agenda pertemuan Komisi meliputi hampir semua masalah hak-hak asasi manusia yang dapat dibayangkan. Pidato resmi dapat berlangsung selama berjam-jam, dan beribu-ribu halaman dokumen dihasilkan untuk pertemuan tersebut. Ruang belakang pertemuan dan kedai kopi di sekitar ruang konferensi penuh dengan para diplomat dan orang-orang yang melakukan lobi dan negosiasi. Dalam sesi terakhir, pertemuan dapat berlangsung sampai malam hari. Komisi menerima sekitar 100 resolusi dan keputusan setiap tahunnya. Suasana pertemuan umumnya tegang, sangat sibuk dan sangat dipolitisir.

Komisi Hak Asasi Manusia dan Masalah-Masalah Masyarakat Adat

Pada tahun-tahun terakhir, Komisi telah mengalokasikan waktu dan perhatian yang terus bertambah untuk masalah-masalah masyarakat adat. Pada tahun 1996 untuk pertama kalinya Komisi mengikutsertakan agenda khusus yang disebut "Isu-isu adat". Resolusi yang diterima oleh Komisi terkait dengan agenda khusus tersebut adalah draf Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat, Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat, Forum Permanen untuk Isu Masyarakat Adat dan penancangan Dekade Internasional Masyarakat Adat Dunia.

Partisipasi dalam Komisi Hak Asasi Manusia

Meskipun Komisi adalah badan hak asasi manusia PBB yang paling penting, LSM-LSM yang mewakili masyarakat adat sering tidak berhasil mempengaruhi pemikiran mengenai hak-hak asasi manusia dalam forum ini. Pekerjaan Komisi sangat ditentukan oleh para pemerintah dan karena itu sangat berbeda dengan pekerjaan Sub-Komisi dan Kelompok Kerja. Persyaratan memperoleh status formal untuk mengikuti pertemuan Sub-Komisi juga diperlukan untuk menghadiri pertemuan Komisi ini. Satu-satunya wakil LSM yang diperkenankan untuk ikut berpartisipasi adalah mereka yang telah mendapat akreditasi dari LSM yang memiliki status Ecosoc. Namun tetap ada kesempatan untuk mendapat akreditasi dari organisasi masyarakat adat lainnya atau LSM internasional lainnya yang memiliki status ini, sebagaimana yang telah diterangkan pada bagian Sub-Komisi.

Banyak LSM-LSM menghadiri pertemuan untuk menyampaikan pidatonya, tetapi biasanya terdapat banyak hal yang terjadi sehingga para pemerintah biasanya hanya sedikit memperhatikan pidato dari individu atau organisasi yang berasal dari negaranya. Mengingat bahwa LSM hanya diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan agendanya masing-masing dan mengingat biaya untuk mengirim orang dan tinggal di Jenewa, Maka harus dipertimbangkan dengan cermat potensi manfaat berpartisipasi dan biaya yang harus dikeluarkan. LSM-LSM yang memiliki pengaruh terbesar dalam Komisi cenderung berasal dari organisasi yang besar seperti Amnesty Internasional atau International Commission of Jurist, atau LSM-LSM yang terkait dengan tema khusus, seperti LSM yang menuntut adanya perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara tertentu.

Karena itu dikatakan, anda dapat menyampaikan kepedulian melalui berbagai tindakan yang terkait dengan Komisi Hak Asasi Manusia.

Menyampaikan Pidato

Karena pertemuan Komisi merupakan forum hak asasi manusia dalam sistem PBB yang paling penting, pidato-pidato yang disampaikan dalam pertemuan komisi ini memiliki pengaruh besar dibandingkan pidato-pidato lainnya yang dibuat dalam sistem PBB.

Berjaringan dengan masyarakat adat lain dan organisasi hak asasi manusia

Terdapat peningkatan jumlah masyarakat adat yang mengangkat masalah-masalah hak asasi manusianya di dalam Komisi. Tujuan mereka adalah untuk mempengaruhi resolusi-resolusi mengenai masalah-masalah adat. Mereka juga sangat antusias untuk berpartisipasi dalam diskusi-diskusi informal antar mereka dan dengan para pemerintah mengenai persiapan-persiapan yang berjalan dalam Komisi Kelompok Kerja untuk draf Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat. Komisi Hak Asasi Manusia juga menyediakan kesempatan untuk memperoleh dukungan dari kelompok hak asasi manusia lainnya untuk membangun lobi yang kuat bagi apa yang anda perjuangkan.

Lobi kepada Pemerintah Sendiri

Pemerintah menentukan agenda –dan hasilnya ditentukan di dalam Komisi. Jika anda ingin mencapai sesuatu dalam sesi pertemuan Komisi Hak Asasi Manusia, maka anda disarankan untuk mencapainya melalui pendekatan dengan pemerintah anda sendiri. Banyak pemerintah ingin menampilkan diri secara aktif peduli terhadap masalah-masalah hak-hak asasi manusia dan dapat terbuka untuk masukan-masukan dari LSM.

Jika tujuan anda secara garis besar sejalan atau tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah anda, maka pemerintah anda mungkin bersedia untuk membantu memastikan bahwa gagasan tertentu diintegrasikan dengan resolusi-resolusi Komisi yang relevan.

Anda tidak harus pergi ke Jenewa untuk mempengaruhi pemerintah anda dengan cara di atas, meskipun anda perlu mengikuti perkembangan masalah tersebut secara ketat. Anda dapat menyampaikan pandangan anda dengan menghubungi Menteri luar negeri

langsung. Bahkan jika tujuan anda bukan sesuatu yang disiapkan oleh pemerintah untuk disampaikan dalam Komisi anda siap untuk diangkat dalam Komisi, akan sangat berguna untuk menyampaikan pandangan dan program aksi yang anda harapkan kepada pemerintah.

Lobi Para LSM Internasional

Beberapa LSM bukan adat yang memiliki status diakui untuk menghadiri pertemuan PBB (seperti Amnesty Internasional dan Komisi Internasional Para Juri) memiliki banyak pengalaman dalam berhubungan dengan sistem hak asasi manusia PBB. LSM-LSM tersebut merupakan anggota reguler dalam pertemuan Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub-Komisi tetapi mereka tidak begitu menonjol dalam pertemuan Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat. Mereka cenderung hanya berminat pada kondisi hak-hak asasi manusia di negara-negara tertentu. Namun demikian, beberapa di antara mereka memiliki perhatian tetap pada hak-hak asasi masyarakat adat. Misalnya, laporan-laporan Amnesty Internasional mengenai berbagai negara sering meminta perhatian atas pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

Beberapa LSM tersebut memiliki kantor tetap di Jenewa. Beberapa di antaranya juga memiliki jaringan di negara lain. Akan bermanfaat jika anda menyampaikan apa yang menjadi permasalahan anda dan meminta mereka untuk mengangkat masalah-masalah anda dalam pertemuan-pertemuan PBB yang penting. Misalnya, jika salah satu dari organisasi tersebut memberikan pernyataan kepada Komisi Hak Asasi Manusia yang melaporkan bahwa pemerintah anda telah gagal menegakkan hak-hak masyarakat adat, maka tidak dapat diragukan lagi pemerintah anda pasti akan terpengaruh oleh laporan tersebut. Kritik yang disampaikan dari pihak luar kepada pemerintah seperti ini biasanya memiliki pengaruh lebih besar kepada pemerintah dari pada kritik yang disampaikan dari dalam negeri sendiri.

Dengan memberitahukan kepada organisasi tersebut apa yang menjadi kepedulian atau masalah anda, maka hal tersebut akan diteruskan kepada lebih banyak orang lagi yang bersimpati dengan masalah yang anda sampaikan. Melalui cara ini dapat mendorong timbulnya kampanye internasional ditujukan untuk membangun kesadaran atas terjadinya pelanggaran hak-hak anda sebagai masyarakat adat. Dengan berjalannya waktu, kampanye-kampanye seperti ini dapat menghasilkan tindakan yang akan membantu menyelesaikan masalah anda.

Menyediakan Informasi kepada Pelapor Khusus dari Komisi

Pekerjaan Komisi Hak Asasi Manusia tidak hanya terbatas pada pertemuan tahunan di Jenewa saja. Komisi memiliki berbagai kelompok kerja yang berkumpul untuk membuat tolok ukur atau pedoman baru, misalnya draf Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat, atau untuk membicarakan masalah-masalah penting, seperti hak untuk membangun. Pegawai-pegawai sipil internasional yang bekerja untuk Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak-Hak Asasi Manusia melaksanakan resolusi-resolusi yang ditetapkan oleh Komisi sepanjang masa reses sidang dengan menyiapkan laporan-laporan, mengatur pertemuan dan meluncurkan proyek-proyek.

Salah satu elemen terpenting dari pekerjaan Komisi adalah melakukan investigasi dan melaporkan masalah-masalah hak asasi manusia. Ini dilakukan melalui apa yang biasa dikenal sebagai ‘mekanisme’ yang terdiri dari para pakar perorangan atau kelompok kerja dengan 5 anggota. Para pakar perorangan memiliki beberapa nama, dan salah satu yang paling umum digunakan adalah “ **Pelapor Khusus atau *Special Rapporteur***”. Beberapa mekanisme ini dapat berjalan di satu negara; beberapa hanya fokus untuk masalah-masalah tertentu, seperti penyiksaan, penculikan paksa atau kekerasan terhadap perempuan. Meskipun informasi berikut ini mengacu hanya kepada pelapor khusus, pertimbangan-pertimbangan yang sama juga berlaku bagi mekanisme lain meskipun mekanisme tersebut memiliki nama yang berbeda.

Di waktu yang telah lewat, masyarakat adat belum banyak menggunakan pelapor khusus. Tiap-tiap pelapor khusus mengumpulkan informasi baik itu yang disediakan oleh LSM-LSM atau yang diminta dari para pemerintah. Informasi tersebut kemudian digabungkan ke dalam laporan yang dipresentasikan setiap tahun pada Komisi Hak Asasi Manusia. Laporan ini dapat memuat daftar semua klaim yang dibuat oleh pelapor mengenai pelanggaran-pelanggaran tertentu sesuai tugas yang harus dilakukannya. Kadang-kadang, pelapor harus mengunjungi suatu negara, dengan persetujuan pemerintah dari negara yang dikunjungi, untuk melakukan pengamatan lebih mendalam. Dalam kondisi seperti ini, pelapor khusus akan membuat laporan tambahan. Laporan ini dapat memuat komentar-komentar atas kegagalan pemerintah atau hanya memuat kembali pengaduan yang ada dan respon pemerintah atas pengaduan tersebut.

Beberapa pelapor khusus lebih berkaitan dengan kondisi masyarakat adat dari pada pelapor lainnya, antara lain Pelapor Khusus untuk Ringkasan Pelaksanaan Penyelesaian Arbitase Sengketa, Pelapor Khusus Intoleransi Keagamaan, Pelapor Khusus mengenai Dampak Buruk dari Pembuangan Illegal Bahan Beracun, Produk-Produk Berbahaya, dan Limbah bagi Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia, Pelapor Khusus mengenai Bentuk-Bentuk Kontemporer Rasialisme, dan Ahli Independen dari Komisi Hak Asasi Manusia mengenai hak untuk membangun. Tabel di bawah ini memuat daftar pelapor khusus yang berhubungan dengan isu-isu yang terkait dengan masyarakat adat beserta deskripsi ringkas dari tugas yang diemban.

Masyarakat adat dapat mengirimkan informasi yang terkait dengan tiap-tiap pelapor khusus tersebut ke alamat:

(“The special rapporteur concerned)
c/o Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak-Hak Asasi Manusia
UNOG-OHCHR, Palais Wilson, CH-1211 Geneva
Tel. 41-22-917-900 Fax: 41-22-917-9003
E-mail: www.webadmin.hchr@unog.ch

Cara melaporkan

Mungkin akan lebih efektif untuk menyediakan informasi melalui organisasi yang mapan, layak dan terpercaya dari pada melalui individu, sebab dengan melakukan hal tersebut maka anda menekankan bahwa masalah-masalah tersebut tersebar luas dan tidak terbatas pada satu atau dua individu. Informasi minimum yang harus diikutsertakan dalam komunikasi dengan pelapor khusus tidak berbeda jika pelapor

khusus itu memfokuskan kepada satu negara atau pada topik tertentu. Informasi yang disampaikan adalah:

- identifikasi korban
- identifikasi orang yang bertanggung jawab atau melakukan pelanggaran
- identifikasi individu atau organisasi yang melaporkan (komunikasi dengan pengirim yang tidak memberitahu identitasnya tidak diperkenankan)
- deskripsi secara detail kondisi kejadian dimana pelanggaran terjadi

Detail-detail lainnya yang menyangkut pelanggaran mungkin akan dibutuhkan dengan mekanisme tematik yang relevan (misalnya lokasi penahanan korban di masa lampau dan sekarang, sertifikat medis yang menyangkut korban, identifikasi saksi mata yang menyaksikan pelanggaran, tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah di tingkat lokal, dll).

Secara prinsip, komunikasi tidak akan dipertimbangkan jika mereka termasuk dalam resolusi 1503 Dewan Ekonomi Sosial dan Budaya (lihat informasi mengenai “prosedur 1503” di bawah) dan atau Protokol Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (lihat Lembaran Nomor 4 mengenai “Badan-Badan Berdasarkan Kesepakatan Hak-Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Adat”).

Sudah menjadi aturan umum bahwa komunikasi yang menggunakan kata-kata yang kasar atau secara jelas memiliki maksud-maksud politisik tertentu tidak akan dipertimbangkan. Komunikasi harus menggambarkan fakta-fakta dari kejadian dan menyediakan informasi detail lainnya yang relevan secara jelas dan padat. Laporan-laporan dari para saksi mata atau informasi pendukung lainnya di tempatkan pada bagian lampiran. Informasi seharusnya tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi tetapi juga memberikan indikasi bagaimana pertanggungjawaban negara anda atas masalah tersebut. Adalah langkah yang tidak tepat untuk mengangkat suatu isu kepada pelapor khusus jika pemerintah yang bersangkutan telah mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Informasi dapat diserahkan kapan saja, tetapi mengingat laporan khusus juga biasanya mengikutsertakan respon pemerintah atas klaim yang disampaikan dan laporan tersebut harus dapat diselesaikan untuk dilaporkan dalam sesi pertemuan Komisi Hak Asasi Manusia pada bulan Maret- April, maka sebaiknya informasi diserahkan paling lambat pada bulan Oktober/November. Informasi yang diserahkan setelah periode tersebut mungkin tidak dapat dibahas sampai sesi pertemuan tahun berikutnya lagi. Informasi yang anda serahkan akan muncul dalam laporan yang relevan bersama dengan respon dari pemerintah anda, jika ada.

Beberapa Pelapor Khusus dan Tugas-tugasnya

Pelapor Khusus	Tugas
Extrajudicial, Resume Keputusan Arbitrase	- Memeriksa kondisi-kondisi extrajudicial, membuat Resume Keputusan Arbitrase atau Arbitrary Executions dan menyerahkan hasil-hasil temuan bersama dengan kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi setiap tahun

	<p>kepada Komisi Hak Asasi Manusia serta laporan-laporan lainnya yang menurut Pelapor Khusus harus diketahui oleh Komisi Hak Asasi Manusia dalam kaitan dengan kondisi ekstra judicial, resume keputusan arbitrase yang menyebabkannya harus mendapat perhatian segera.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan tanggapan yang efektif atas informasi yang diterima manakala keputusan arbitrase, kondisi ekstra judicial terancam atau ketika sudah berlangsung. - Meningkatkan dialog dengan pemerintah serta menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil dari laporan kunjungan ke negara-negara tertentu
<p>Dampak Buruk dari Pembuangan Ilegal Bahan-Bahan Beracun, Berbagai Produk Berbahaya dan Limbah bagi Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan investigasi dan memeriksa dampak pembuangan ilegal bahan-bahan beracun, berbagai produk berbahaya dan limbah di Afrika dan negara-negara berkembang lainnya bagi pemenuhan hak-hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup dan hak untuk kesehatan bagi semua orang - melakukan investigasi, pengawasan, memeriksa dan menerima komunikasi dan mengumpulkan informasi perdagangan dan pembuangan bahan-bahan beracun, produk berbahaya dan limbah di Afrika dan negara-negara berkembang lainnya - Membuat rekomendasi dan proposal dengan tingkat memadai untuk melakukan kontrol, pengurangan dan penghapusan perdagangan ilegal dari kegiatan pengiriman dan pembuangan bahan-bahan beracun , berbagai produk berbahaya dan limbah di Afrika dan negara-negara berkembang lainnya. - Mengeluarkan daftar negara dan perusahaan transnasional yang terlibat dalam pembuangan ilegal bahan-bahan beracun, produk berbahaya dan limbah di Afrika dan negara-negara berkembang lainnya, dan sensus korban manusia yang terbunuh , cacat atau terluka akibat kegiatan tersebut di negara-negara berkembang
<p>Bentuk-Bentuk Kontemporer dari Rasialisme, Diskriminasi Rasial dan Xenophobia dan intoleransi lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kejadian-kejadian dari berbagai bentuk kontemporer rasialisme, diskriminasi rasial, segala bentuk diskriminasi terhadap orang kulit hitam, Arab atau muslim, xenophobia, Negrophobia, anti Semits dan intoleransi lainnya; serta tindakan-tindakan pemerintah untuk mengatasinya
<p>Ketiadaan Toleransi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kejadian-kejadian dan tindakan-

Keagamaan	tindakan pemerintah di seluruh belahan dunia yang tidak konsisten dengan apa yang dinyatakan dalam Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan; dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sesuai untuk mengatasinya
Ahli Independen Komisi Hak-Hak Asasi Manusia atas Hak untuk Membangun	- Menyerahkan laporan yang menyeluruh kepada Sidang Umum mengenai dampak-dampak kemiskinan, penyesuaian structural, globalisasi, liberalisasi dan diregulasi perdagangan dan keuangan; juga mengenai prospek kesejahteraan atas hak untuk membangun di negara-negara berkembang

Daftar semua pelapor khusus dan dilihat di website OHCHR: www.unhchr.ch under “OHCHR Programme”, “Extra-Conventional mechanisms”

“Tindakan Mendesak (*Urgent Action*)” prosedur dibawah mekanisme ekstra-konvensional

Mekanisme ekstra-konvensional, juga disebut “prosedur khusus”, terdiri dari pelapor khusus, wakil-wakil, para ahli dan kelompok-kelompok kerja. Komunikasi yang disampaikan kepada prosedur khusus ini biasanya berisi pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia yang akan terjadi (misalnya, eksekusi ekstra-judicial yang akan segera terjadi, kekhawatiran bahwa tawanan akan disiksa atau terancam jiwanya akibat penyakit yang tidak mendapat perawatan medis, dll), dan untuk kasus-kasus penculikan manusia merupakan kasus-kasus terkini atau yang baru saja terjadi. Dalam hal ini, pelapor khusus atau pimpinan kelompok kerja dapat mengirimkan pesan kepada pihak yang berwajib dari negara yang bersangkutan melalui faks atau telegram, meminta klarifikasi masalah yang bersangkutan dan meminta pemerintah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin hak-hak dari korban. Permintaan kelompok kerja tersebut merupakan tindakan pencegahan yang pertama dan utama; dan sama sekali bukan merupakan penilaian awal untuk kesimpulan. Umumnya permintaan tersebut sering disampaikan berdasarkan mekanisme tema tertentu, baik menyangkut Pelapor Khusus mengenai kondisi ekstra judicial, resume keputusan arbitrase dan Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan, serta Kelompok-Kelompok Kerja mengenai Penculikan Paksa dan mengenai Penahanan Paksa. Walaupun demikian, tema-tema dan mekanisme negara lainnya juga sering disampaikan dengan prosedur tersebut. Dalam beberapa kasus, dimana situasi kasus membutuhkan pendekatan seperti ini, permohonan dapat disampaikan oleh beberapa Pelapor Khusus dan atau kerjasama antar kelompok kerja. Kriteria-kriteria untuk melakukan intervensi segera berbeda antara mandat yang satu dan yang lainnya

Permohonan untuk intervensi segera dapat ditujukan kepada

(Nama Pelapor atau Kelompok Kerja yang dituju)
c/o OHCHR-UNOG, 1211 Geneva 10
Switzerland, Fax: (41 22) 917-9003

E-mail: webadmin.hchr@unog.ch

Tulisan “**Untuk Tindakan Segera/ For Urgent Action**” harus dicantumkan pada awal komunikasi sehingga dapat segera disampaikan kepada yang dituju.

Prosedur Pengaduan Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (Prosedur 1503)

Individu maupun LSM dapat membuat pengaduan atas pelanggaran hak-hak asasi manusia kepada Komisi Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1970, proses yang disebut **Prosedur 1503** (mengikuti nomor resolusi Dewan Ekonomi Sosial Budaya yang menetapkan prosedur tersebut) ditetapkan. Prosedur tersebut kemudian diperbaharui pada sesi pertemuan ke 56 Komisi Hak Asasi Manusia tahun 2000 untuk meningkatkan efektifitasnya. Mekanisme pengaduan ini hanya bermanfaat bagi masyarakat adat dalam kondisi-kondisi tertentu.

Komisi hanya mempertimbangkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang keji dan dapat dipastikan sungguh-sungguh terjadi. Fokusnya cenderung pada hak-hak sipil dan politik daripada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang umumnya merupakan masalah masyarakat adat. Biasanya, Komisi menganggap tindakan-tindakan diskriminasi, pengadilan yang berat sebelah, penyiksaan, pembunuhan oleh otoritas pemerintah, penahanan yang sewenang-wenang, dan penanganan demonstrasi dengan kekerasan sebagai tindakan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia. Pengaduan kasus harus mengupayakan semaksimal mungkin menggunakan penyelesaian domestik dimana masyarakat adat atau penggugat harus menunjukkan bahwa mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan di negaranya masing-masing

Komunikasi yang dilakukan sesuai Procedure 1503 harus mengikuti aturan-aturan sebagai berikut agar dapat diterima:

- tidak ada komunikasi yang diperkenankan jika itu bertentangan dengan prinsip-prinsip piagam PBB atau jika itu menunjukkan motivasi politik
- Komunikasi hanya dapat diterima jika ada alasan yang kuat yang dapat diterima, selain juga telah mempertimbangkan jawaban yang diberikan dari negara yang bersangkutan, dan menunjukkan adanya satu pola konsisten dari pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
- Komunikasi dapat berasal dari individu atau kelompok yang menyatakan telah menjadi korban pelanggaran hak-hak asasi manusia, atau yang memiliki informasi langsung dan dapat diandalkan tentang telah terjadinya pelanggaran.
- Komunikasi anonim (tanpa identitas pengirim) tidak dapat diterima contohnya seperti laporan-laporan yang hanya berdasarkan laporan media masa.
- Setiap komunikasi harus menggambarkan fakta-fakta, tujuan petisi yang disampaikan serta hak-hak yang dilanggar. Menurut aturannya, komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan dan penghinaan kepada negara dalam menyampaikan pengaduannya tidak akan dipertimbangkan
- Upaya penyelesaian masalah secara domestik harus diusahakan sekuat tenaga sebelum melakukan komunikasi, kecuali jika pihak penggugat dapat menyakinkan bahwa penyelesaian pada tingkat nasional tidak akan efektif atau dapat berjalan dalam waktu yang sangat lambat.

Komunikasi yang dimaksud untuk mengikuti Prosedur 1503 dapat dikirim ke

Support Services Branch
OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10, Switzerland
Faks: (41-22) 917 90-11

Proses yang berlangsung akan benar-benar bersifat rahasia, bahkan hal ini sering disebut sebagai “prosedur rahasia”. Proses ini juga cenderung lebih bersifat politik daripada hukum. Tujuannya bukan untuk mengupayakan penyelesaian atas pengaduan pelanggaran hak-hak asasi manusia melainkan untuk mengidentifikasi negara-negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran. Dalam beberapa kasus, sebuah negara mungkin menginginkan agar negara lainnya diidentifikasi untuk alasan-alasan politik.

Meskipun tidak terjadi ancaman atas hak-hak sipil dan politik secara formal di negara anda, namun kesulitan dan tekanan yang dialami oleh beberapa kelompok dan masyarakat sedemikian parah, maka dapat dikatakan terjadi pola yang konsisten dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia yang keji dan nyata. Meskipun kecil kemungkinannya bagi Komisi Hak Asasi Manusia memberikan kritik terhadap pemerintah anda melalui prosedur ini, semua pengaduan yang disampaikan di bawah prosedur ini akan disampaikan kepada pemerintah yang bersangkutan oleh PBB. Hal ini akan memberi peringatan bahwa pemerintah dapat diminta pertanggungjawabannya di forum internasional. Selain itu, pengaduan tersebut juga akan menarik perhatian pemerintah-pemerintah lainnya yang menjadi anggota Komisi.

Sidang Umum

Kata-Kata Kunci dan Topik

Sidang Pleno Komite Ketiga

***Ringkasan:** Sidang Umum adalah badan tertinggi dalam PBB. Komite ketiga mengurus hak-hak asasi manusia*

Sidang Umum adalah badan tertinggi dalam PBB. Sidang umum biasanya diselenggarakan di New York dari bulan September sampai Desember setiap tahun, meskipun sesi-sesinya dapat di lakukan sepanjang tahun. Sidang umum bukan hanya terdiri dari satu pertemuan saja tetapi terdiri dari banyak pertemuan komite yang berlangsung pada waktu bersamaan, dimana masing-masing komite membahas topik khusus dari pekerjaan PBB, beserta **sidang pleno** dimana masing-masing komite memberikan laporannya. Hak-hak asasi manusia berada dibawah **Komite Ketiga**

yang juga menangani isu-isu sosial lainnya seperti pengungsi, kriminalitas, perempuan dan pembangunan sosial.

Komite Ketiga menerima berbagai laporan dari semua badan-badan yang ada di bawahnya, seperti Komisi untuk Hak-Hak Asasi Manusia (melalui Dewan Ekonomi Sosial dan Budaya) and badan-badan kesepakatan hak-hak asasi manusia. Komite ini menerima berbagai resolusi, seringkali serupa dengan yang diterima Komisi, dimana kemudian disetujui oleh sidang pleno.

Berpartisipasi dalam Sidang Umum

Tidak banyak yang dapat dilakukan secara langsung oleh individu ataupun LSM di dalam Sidang Umum. LSM-LSM tidak punya hak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan Sidang Umum. Anda dapat melakukan lobi secara informal di koridor-koridor tetapi ini hanya akan bermanfaat jika anda memiliki tujuan yang sangat khusus. Namun demikian, anda dapat mengangkat apa yang menjadi kepedulian anda kepada anggota-anggota dari delegasi pemerintah anda sendiri, dengan tujuan untuk menyakinkan mereka untuk mengambil sikap mendukung dalam Sidang Umum di New York.